BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Teori Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *"participation"* yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.[1] Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.[2]

2. Bentuk-bentuk partisipasi

Masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Adapun Robert Chambers menyebutkan ada 3 model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli.[3] Seperti menurut Arnstein yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terdapat 8 tingkatan, berbeda dengan Kenji dan Greenwood justru dalam membagi jenjang partisipasi dipersempit menjadi 5 tingkatan. Sedangkan VeneKlasen dengan Miller membagi jenjang partisipasi berjumlah 7 tingkatan. Dari

---

[1] Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 2006), Hal. 655.

[2] Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), Hal. 7.

[3] Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa pendapat para teoritis, pada intinya goal yang diinginkan dari partisipasi masyarakat yaitu munculnya kemandirian masyarakat dalam mengontrol atau memobilisasi diri. Berikut tabel yang menunjukkan model partisipasi masyarakat menurut para ahli :

Tabel 2.1

3 Model Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli

Citizen control	Collective action	Self-mobilization
Delegated power		Interactive participation
Partnership	Co-learning	Functional participation
Placation	Cooperation	Participation for material incentives
Consultation	Consultation	Participation by consultation
Informing		Passive participation
Therapy	Compliance	Token participation or manipulation
Manipulation		
Source: Arnstein	*Source:* adapted from Kanji and Greenwood	*Source:* adapted from VeneKlasen with Miller

Jenjang partisipasi masyarakat dapat direncanakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dari ketiga model partisipasi masyarakat tidak ada klaim yang menegaskan sebagai satu-satunya jenjang yang paling benar dan yang paling otoritatif.[4] Definisi dari "partisipasi" masyarakat adalah sebuah bentuk pemaknaan tentang praktek yang baik.[5] Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata

[4] Robert Chambers, *Ideas For Development*, (London: Earthscan, 2005), Hal. 106.
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"partisipasi" dapat digunakan untuk aktivitas dan hubungan yang berbeda. Jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik.

Menurut pernyataan Sherry R Arnstein yang dikutip oleh Sigit, bahwa membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam 8 tingkat partisipasi masyarakat dengan berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada masyrakat.[6] Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

a. *Citizen control,* masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakt memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihakpihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.[7]
b. *Delegated power,* pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk

[6] Sigit Wijaksono, "*Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman"*, Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

c. *Partnership,* masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masayrakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.[8]

d. *Placation,* pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.[9]

e. *Consultation,* masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah

[8] *Ibid,* Hal. 28.
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.[10]

f. *Informing,* pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.[11]

g. *Therapy,* pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.[12]

h. *Manipulation,* merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, di mana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.[13]

Sejalan dengan penjelasan 8 tingkatan partisipasi, Sigit mengutip pernyataan Arnstein yang berkaitan dengan tipologi di atas di mana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (*non*

[10] *Ibid*, Hal. 28.
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

participation), yang meliputi: *manipulation* dan *therapy*, partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (*degrees of tokenism*), meliputi *informing, consultation*, dan *placation*, partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan (*degrees of citizen power*), meliputi *partnership, delegated power*, dan *citizen power*.[14]

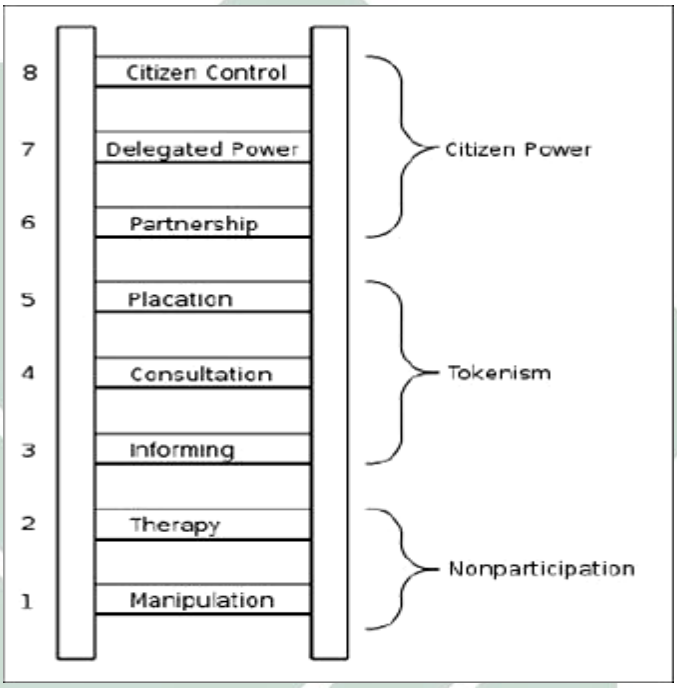

Gambar 2.1 : Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai "non partisipasi" dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan terapi dan manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi. Tangga ketiga, keempat dan kelima sebagai tingkat *Tokenism* yaitu suatu tingkat partisipasi di mana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak

[14] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memiliki kemampuan untuk mendapat jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.[15]

Menurut pernyataan Arnstein yang dinukil oleh Sigit, jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat *Tokenism* adalah penyampaian informasi (*informing*), konsultasi, dan peredaman kemarahan (*placation*). Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masayrakat (*citizen control*). Pada tingkat ke 7 dan 8, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan-keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu objek kebijakan tertentu.[16]

Delapan tangga partisipasi yang telah dijelaskan ini memberikan pemahaman bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk manipulasi program partisipasi masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (*devious methods*) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagaimana Hessel

[15] *Ibid*, Hal. 29.
[16] *Ibid*, Hal. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutip pernyataan Nelson yang menyebutkan adanya dua macam bentuk partisipasi[17], yaitu :

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi diantara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Jadi, seseorang dikatakan berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan jika individu itu benar-benar melibatkan diri secara utuh dengan mental dan emosinya, bukan sekedar hadir dan bersikap pasif terhadap aktivitas tersebut. Adapun rasa tangung jawab sebagai salah satu unsur dari partisipasi, sebagaimana merupakan aspek yang menentukan dalam pengambilan keputusan individu untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Pendapat dari Hicks juga dikutip oleh Hessel terkait merumuskan rasa tanggung jawab sebagai suatu kualitas masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui semua hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas.[18]

Rasa tanggung jawab ini memliiki implikasi positif yang luas bagi proses pembangunan, sebab didalamnya masyarakat berkesempatan

[17] Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Hal. 323-324.
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan ke hal-hal yang lebih besar, memiliki keyakinan akan kemampuan diri sendiri, mempunyai kesempatan memutuskan sendiri apa yang dikehendakinya, dan lebih jauh lagi masyarakat merasa memiliki hasil-hasil dari pembangunan itu.

B. Kesadaran Kolektif Menuju Perubahan Sosial

Dalam membangun kesadaran masyarakat secara umum, maka seringkali dijumpai suatu kelompok atau komunitas. Di manapun individu itu tinggal, pasti berinteraksi dengan individu yang lainnya sehingga membentuk sebuah komunitas. Jim Ife dalam mengartikan sebuah komunitas yaitu seseorang yang melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam beberapa waktu.[19] Dalam membangun *good society* tentu harus didasari dengan kesadaran secara kolektif, pemahaman secara kolektif, memiliki pengalaman atau saling membagi pengalaman secara kolektif dan melakukan sebuah tindakan juga secara kolektif. Itulah kesadaran yang harus dibangun dalam sebuah komunitas secara umum bukan malah individualisme yang merupakan inti dari sifat egoisme dalam melakukan atau merencanakan sebuah kegiatan.

Di samping itu, ada tiga komponen menuju perubahan sosial dalam membangun *good society.* Komponen pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat seperti pelayanan sosial, ekonomi, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya komponen kedua yaitu hubungan kerja sama atau sering disebut istilah asosiasi dengan orang lain

[19] Jim Ife, *Human Right From Bellow Achieving rights Through Community Development,* (New York: Cambridge University Press, 2009), Hal. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti menghormati dan menghargai budaya orang lain, peduli dan berbagi antar sesama. Komponen ketiga tentang partisipasi pada kuasa atas tata kelola masyarakat. Tiga komponen terkait dapat dilihat pada gambar di bawah ini.[20]

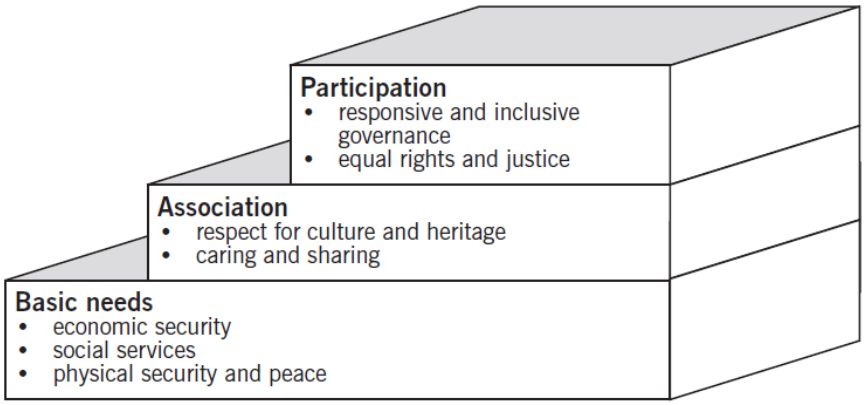

Gambar 2.2 : Tiga Komponen dalam membangun *good society*

Adapun hubungan terkait pemenuhan setiap lapisan mempunyai harapan untuk terwujud dalam indikator ini dan memiliki hasil.

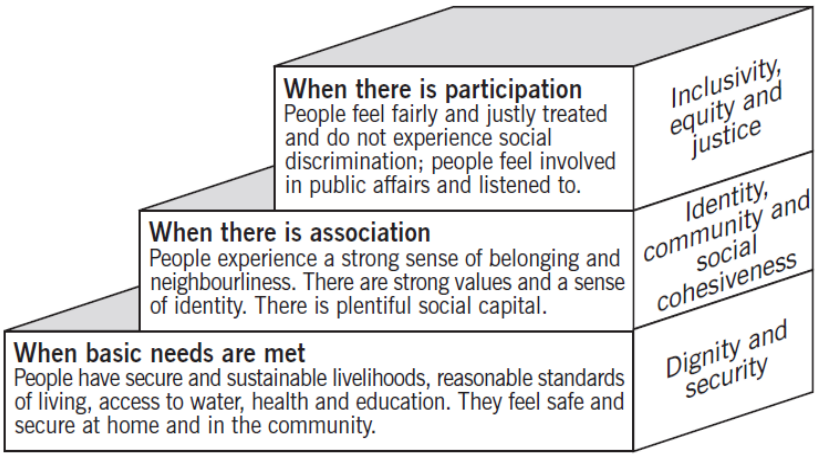

Gambar 2.3 : Relasi pemenuhan lapisan pada tiga komponen dalam membangun *good society*

[20] Barry Knight, Hope Chigudu, dan Rajesh Tandon, *Reviving Democrary Citizen at the Heart of Goverence*, (London:Eartscan, 2002), Hal. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga komponen di atas, maka ada relasi dalam pemenuhan antar lapisan, diantaranya ketika kebutuhan dasar terpenuhi maka orang-orang memiliki mata pencaharian yang aman dan berkelanjutan, standar hidup yang layak, akses terhadap air, kesehatan dan pendidikan. Mereka merasa aman dan aman di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian ketika ada asosiasi maka orang mengalami rasa yang kuat seperti rasa memiliki, rasa peduli dan bertetangga. Terakhir, ketika ada partisipasi yang muncul maka orang merasa cukup dan adil diperlakukan dan tidak mengalami diskriminasi sosial, orang merasa terlibat dalam urusan publik.[21]

Social current atau arus kelompok mempunyai arti bahwa kesadaran kolektif yang terdapat dalam diri seseorang hanya ada pada saat orang itu berkumpul tapi apabila orang tersebut keluar dari kelompok itu maka hilanglah kesadaran kolektif yang ada pada diri orang tersebut. Maka dari itu untuk membangun kesadaran kolektif dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam melakukan setiap kegiatan atau urusan publik.

C. Hubungan Kependudukan, Pembangunan, dan Kerusakan Lingkungan

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selalu menjalankan kegiatan seperti kegiatan di lingkungan pemukiman, pabrik, perdagangan dan sebagainya. Pada dasarnya kegiatan mereka adalah pemanfaatan berbagai sumber daya yang berperan sebagai pendukung kehidupan (*life support*).[22] Dalam setiap aktivitasnya masyarakat selalu menghadapi resiko atau bahaya dari lingkungannya. Namun demikian masyarakat juga memberikan resiko

[21] *Ibid*, Hal. 65.
[22] Didik Saruji, *Wawasan lingkungan*, (Surabaya: CV. Media Ilmu, 2006), Hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya dan kerusakan terhadap lingkungan akibat dari pekerjaan itu sendiri. Masyarakat memandang lingkungan hidup hanya dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri.

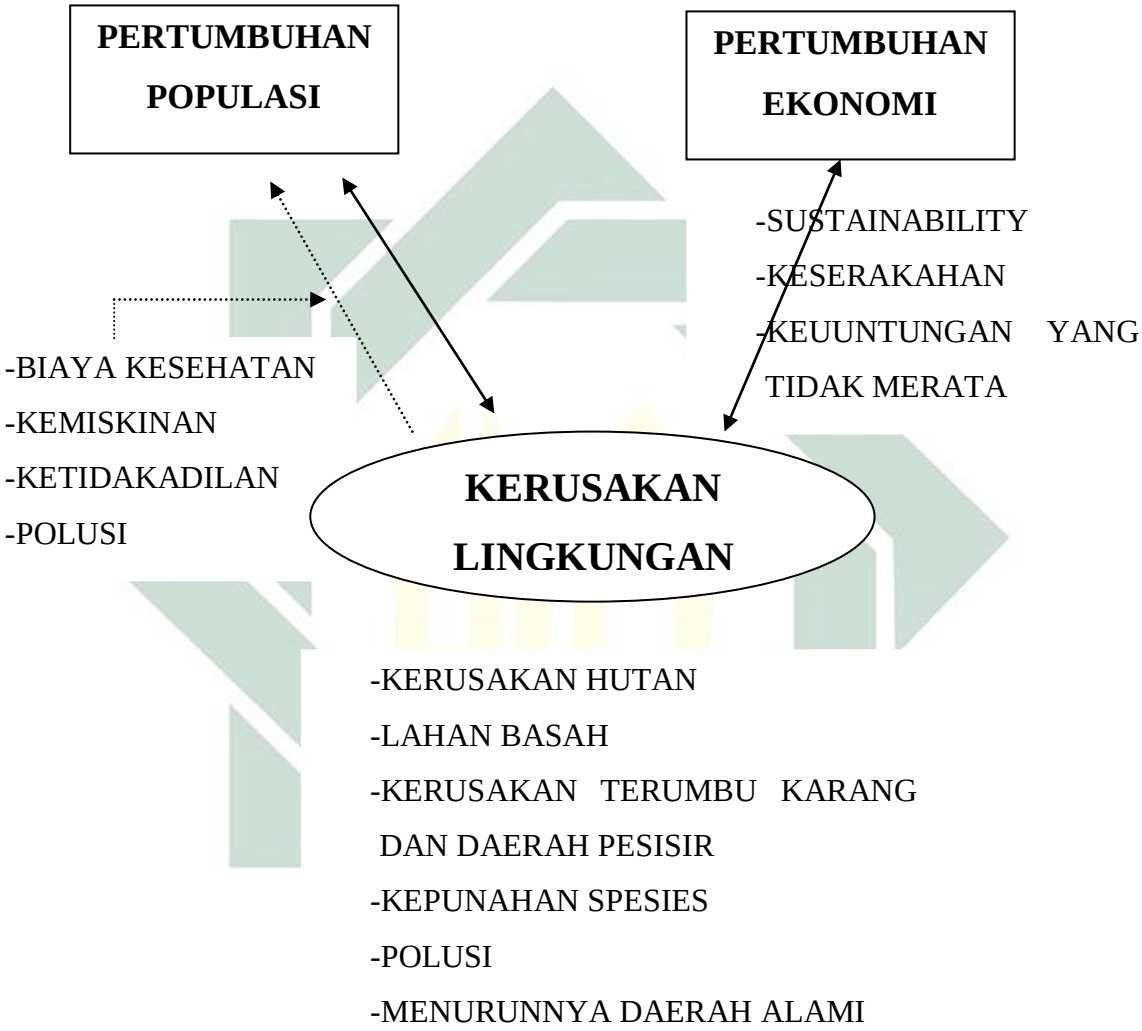

Gambar 2.4 : Hubungan Kependudukan, Pembangunan, dan Kerusakan Lingkungan

Adapun hubungan kependudukan dengan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan akan dijelaskan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tekanan Kependudukan

Kepadatan populasi penduduk berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang merupakan media dimana segala kebutuhan masyarakat didalamnya diperoleh. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk maka pada gilirannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tersebut memicu terjadinya eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, sehingga terjadilah kerusakan bahkan kehancuran sumber daya di sekitar mereka.[23] Adapun permasalahan kependudukan di Indonesia yang berpengaruh terhadap tekanan pada lingkungan adalah :

a. Jumlah penduduk yang semakin bertambah
b. Sebagian penduduk berusia muda
c. Persebaran penduduk yang tidak merata membawa dampak tersendiri dalam kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan.
d. Besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian 52,2% penduduk hidup di pedesaan.
e. Meningkatnya penduduk yang masuk pasar kerja.

Seiring dengan kepadatan penduduk semakin meningkat, maka memicu tumbuhnya pemukiman kumuh yang merupakan akibat dari urbanisasi, migrasi yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari nafkah. Hidup di kota sebagai warga dengan mata pencaharian terbanyak pada sektor informal. Pada dasarnya pertumbuhan

[23] *Ibid*, Hal. 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sektor informal bersumber pada urbanisasi penduduk dari pedesaan ke kota, atau dari kota satu ke kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian di mana mereka tinggal, sudah terbatas, bahkan kondisi desapun tidak dapat lagi menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, sedangkan yang migrasi dari kota ke kota lain, kota tidak lagi mampu menampung, karena lapangan kerja sangat terbatas. Akhirnya dengan adanya pemanfaatan ruang yang tidak terencana di beberapa daerah, terjadi penurunan kualitas lingkungan bahkan kawasan pemukiman, terutama di daerah perkotaan yang padat penghuni, berdekatan dengan kawasan industri, kawasan bisnis, kawasan pesisir dan pantai yang dihuni oleh keluarga para nelayan, serta di bantaran sungai, dan bantaran rel kereta api.

2. Tekanan Pembangunan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat ditunjukkan adanya kegiatan dalam bentuk yang lebih umum disebut pembangunan.[24] Pembangunan sebagai kegiatan untuk menyejahterkan masyarakat selalu ditingkatkan akselerasinya. Pembangunan sendiri berarti terjadinya perubahan besar yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan perubahan lingkungan hidup. Padahal semua kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak akan terlepas dari pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga secara pasti terjadinya sumber daya alam terutama yang tidak terbaharui akan terus menipis.

[24] *Ibid*, Hal. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permintaan akan sumber alam khususnya tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk, terutama di Pulau Jawa-Madura, disertai tingkat pendapatan yang rendah. Yang tidak dapat dihindari adalah pertumbuhan industri yang dipercepat sehingga mau tidak mau akan terjadi pengalihan pemanfaatan lahan. Sumber daya alam berupa air, udara, dan tanah menjadi menurun kualitasnya akibat pembangunan. Akibat dari pembangunan berdampak pada lingkungan hidup, maka dampak tersebut dapat dikelompokkan menjadi *dampak lingkungan fisik, dampak linggkungan kimia, dampak lingkungan biologis, dampak lingkungan sosial, dampak lingkungan budaya, dan dampak terhadap kesehatan masyarakat.*[25]

a. Dampak lingkungan fisik

Suatu kegiatan pembuatan jalan bebas hambatanmisalnya, terpaksa harus memangkas bukit atau mengurug tebing, sehingga akan berakibat terjadinya perubahan geologis yang menyangkut ketinggian permukaan tanah *(topografi)*. Maka dampak pembuatan jalan tersebut adalah adanya perubahan topografi.[26]

b. Dampak kimia

Suatu industri seperti petrokimia membuang air limbahnya ke pantai seperti peristiwa *Minamata*. Minamata

[25] *Ibid*, Hal. 62.
[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah salah satu nama pantai di Jepang yang digunakan untuk membuang air limbah industri yang mengandung Merkuri. Merkuri adalah salah satu jenis logam berat. Logam berat ini setelah sampai pada rantai makanan bawah terserap oleh plankton, plankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh yang lebih besar. Penduduk Minamata hidup sebgai nelayan yang mengonsumsi hasil laut. Sifat merkuri adalah akumulatif di dalam jaringan. Dalam kadar tertentu merkuri menjadi toksik dan merusak susunan jaringan syaraf pusat. Penderita menjadi terganggu sistem persyarafannya, mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa dan gerak anggota badan yang tidak dapat dikendalikan. Contoh tersebut adalah contoh dampak kimia yang bersifat toksik dengan dampak ikutannya terhadap kesehatan masyarakat.[27]

c. Dampak biologis

Adanya pencemaran pada badan air oleh kotoran manusia atau kotoran hewan akan meningkatkan jumlah kuman dan angka koliform pada badan air. Itu adalah contoh dari dampak lingkungan secara biologis.[28]

d. Dampak sosial

Dalam suatu kegiatan/proyek yang akan dilakukan di suatu tempat memerlukan lahan untuk menjalankan usaha.

[27] *Ibid*, Hal. 63.
[28] *Ibid*, Hal. 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka perlu dilakukan pembebasan usaha. Akhirnya timbullah calo-calo tanah untuk mencari keuntungan pembebasan lahan tersebut. Masyarakat menjadi resah dan saling curiga. Akibatnya akan terjadi gangguan ketertiban dan keamanan. Timbulnya persepsi masyarakat yang negatif dan gangguan kamtibmas adalah contoh dampak sosial dari suatu kegiatan/proyek yang akan dilakukan.[29]

e. Dampak ekonomi

Para petani yang hidup dengan tenang dengan mengolah sawah-ladangnya menjadi terusik bahkan tergiur oleh pembelian tanah dengan harga yang tinggi, sehingga akhirnya mereka rela melapaskan lahannya untuk dijadikan lahan usaha/proyek. Dengan memperoleh uang hasil penjualan yang banyak, mereka merasa kebingungan untuk memanfaatkan uang dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Karena tidak terlatih/disiapkan untuk berusaha/memutar uang secara ekonomi, maka pada akhirnya uangpun habis dan penghasilan tidak ada lagi sehingga terjadilah pengangguran.[30]

f. Dampak budaya

Munculnya kegiatan/proyek yang baru disekitar lingkungan yang telah memiiliki kebudayaan yang bersifat agamis misalnya, atau masyarakat gotong royong, menjadi

[29] *Ibid*, Hal. 65.
[30] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurun tingkat ibadahnya. Dikarenakan adanya peluang membuka usaha (warung/hiburan) dalam memperoleh keuntungan berupa materi yang tidak pernah diperoleh di waktu luang yang biasa dimanfaatkan untuk ibadah. Mereka juga secara perlahan-lahan melepaskan sifat kegotong-royongannya karena pengaruh tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh dari dampak lingkungan budaya dari suatu kegiatan.[31]

g. Dampak kesehatan masyarakat

Terjadinya pencemaran udara, air dan tanah mengakibatkan angka kejadian penyakit tertentu semakin meningkat, bahkan meningkatkan angka kematian. Penyakit saluran pernapasan, penyakit karena perubahan gaya hidup dengan membiasakan diri minum-minuman keras dan penggunaan obat-obatan terlarang. Itulah dampak pembangunan yang menurunkan derajat kesehatan masyarakat.[32]

3. Tekanan Lingkungan

Di samping itu, terkait pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan semakin meningkat maka sering terjadi adanya tekanan lingkungan (*environment pressures*). Tekanan lingkungan sendiri merupakan suatu kondisi lingkungan yang menerima beban yang terlalu besar, yang disebabkan fisik, sosial, ekonomi, akibatnya menimbulkan

[31] *Ibid*, Hal. 65-66.
[32] *Ibid*, Hal. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan-persoalan lingkungan, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Kota (lingkungan) yang padat dan semrawut akan menghasilkan jiwa warganya yang sakit. Jiwa yang sakit menghasilkan kelalaian, sifat malas, dan rasa tidak peduli terhadap sesama yang berdampak datangnya musibah penyakit bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.[33]

Pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungannya. Campur tangan ini akan mengganggu ekosistem atau lingkungan tersebut, dengan kata lain akan menyebabkan kerusakan dan menurunkan kualitas serta fungsi lingkungan, sehingga timbul permasalahan-permasalahan lingkungan.[34] Berbicara tentang lingkungan hidup, maka erat kaitannya dengan dengan hukum lingkungan sebagaimana diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup[35], bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwwawasan lingkungan hidup.

Kesadaran lingkungan hidup yang ada memerlukan pengawasan yang sungguh-sungguh apabila tidak menghendaki terjadinya kerusakan

---

[33] Ike Andini, "*Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya"*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1 No.1 Januari 2013, Hal. 24.

[34] Didik Saruji, *Wawasan lingkungan,...* Hal. 82.

[35] *Ibid*, Hal. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup yang parah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Keadaan ini seringkali disebabkan oleh dorongan-dorongan akibat kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, dan moralitas negatif di kalangan kerja dengan sikap mentalitas negatif di kalangan masyarakat menengah maupun atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id